

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam teori sosial Parson John Scott (2011:228), peran didefinisikan sebagai harapan harapan yang diorganisasi terkait dengan konteks interaksi tertentu yang membentuk orientasi motivasional individu terhadap yang lain. Organisasi sebagai sebuah institusi sosial telah membentuk perspektif terhadap peran yang diterima oleh seorang individu. Teori peran (*role theory*) mengungkapkan bahwa peran adalah salah satu bagian yang dimainkan dalam keseluruhan struktur kelompok, merupakan perilaku khusus yang dikarakterkan seorang individu pada konteks sosial tertentu. Teori peran menekankan sifat individual sebagai pelaku sosial yang mempelajari perilaku sesuai dengan posisi yang ditempatinya di lingkungan kerja dan masyarakat. Individu akan mengalami konflik dalam dirinya apabila terdapat dua tekanan atau lebih yang terjadi secara bersamaan yang ditujukan pada diri seseorang (Janu Murdiyatmoko, 2007:45).

Teori peran menggambarkan interaksi sosial yang diterapkan oleh individu dalam suatu lingkungan berdasarkan kebudayaan yang berlaku. Teori peran (*role theory*) menyatakan bahwa individu yang berhadapan dengan tingkat konflik peran dan ambiguitas peran yang tinggi akan mengalami kecemasan, menjadi lebih tidak puas dan melakukan pekerjaan dengan kurang efektif dibanding individu lain. Individu akan mengalami konflik dalam dirinya apabila terdapat dua tekanan atau lebih yang terjadi secara bersamaan yang ditunjukkan pada diri

seseorang. Terjadinya konflik pada setiap individu disebabkan karena individu tersebut harus menyandang dua peran yang berbeda dalam waktu yang sama.

Peranan atau *role* juga memiliki beberapa bagian (Janu Murdiyatmoko, 2007:25-39), yaitu:

- 1) *Enacted Role* (Peranan nyata) adalah suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang dalam menjalankan suatu peranan.
- 2) *Prescribed Role* (Peranan yang dianjurkan) adalah cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
- 3) *Role Conflict* (Konflik peranan) adalah suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
- 4) *Role Distance* (Kesenjangan Peranan) adalah pelaksanaan peranan secara emosional.
- 5) *Role Failure* (Kegagalan Peran) adalah kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.
- 6) *Role Model* (Model peranan) adalah seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.
- 7) *Role Set* (Rangkaian atau lingkup peranan) adalah hubungan seseorang dengan individu lainnya pada saat dia sedang menjalankan perannya.
- 8) *Role Strain* (Ketegangan peranan) adalah kondisi yang timbul bila seseorang mengalami kesulitan dalam memenuhi harapan atau tujuan peranan yang dijalankan dikarenakan adanya ketidakserasian yang bertentangan satu sama lain. Peranan yang dimaksud dalam penelitian ini

adalah perilaku seseorang sesuai dengan status kedudukannya dalam masyarakat.

Dari bagian-bagian di atas penulis akan mengambil 2 bagian yang sesuai dengan penelitian penulis sekarang yaitu:

- a. *Enacted Role* (Peranan nyata) adalah suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang dalam menjalankan suatu peranan. *Enacted Role* adalah peran yang benar-benar dilaksanakan oleh ibu rumah tangga secara nyata di lapangan dalam program PNPM-MPd, bukan sekadar yang dianjurkan atau diharapkan.
- b. *Prescribed Role* (Peranan yang dianjurkan) adalah cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu. *Prescribed Role* adalah peran yang seharusnya/dianjurkan dilakukan berdasarkan norma, aturan, atau kebijakan program yang telah ditetapkan.

Pemberdayaan masyarakat pada hakekatnya diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup sejahtera bagi individu, keluarga dan kelompok masyarakat terhadap sumber daya untuk melakukan proses produksi dan kesempatan berusaha. Untuk dapat mencapai hal tersebut diperlukan berbagai upaya untuk memotivasi dalam bentuk antara lain bantuan modal dan pengembangan sumber daya manusia. Mengingat pemberdayaan adalah sebuah usaha berkesinambungan untuk menempatkan masyarakat menjadi lebih proaktif dalam menentukan arah kemajuan dalam komunitasnya sendiri. Artinya program pemberdayaan tidak bisa hanya dilakukan dalam satu siklus saja dan

berhenti pada suatu tahapan tertentu, akan tetapi harus terus berkesinambungan dan kualitasnya terus meningkat dari satu tahapan ke tahapan berikutnya.

Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan kelompok di dalam lingkungan kehidupan masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah dalam berbagai aspek kesejahteraan dalam kehidupan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai dalam perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas kehidupannya (Adi, 2001:22).

Pemberdayaan erat kaitannya dengan pembangunan, dan pembangunan merujuk pada tujuan dan perbaikan. Menurut Sulistyani, tujuan pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Pemberdayaan merupakan pembangunan berbasis masyarakat berarti sasaran pemberdayaan itu sendiri adalah masyarakat dan pelaku utama dalam kegiatan tersebut juga masyarakat, tujuan utama dalam pemberdayaan masyarakat adalah terciptanya kemandirian. Kemandirian masyarakat adalah suatu kondisi yang ditandai oleh kemampuan untuk berpikir, memutuskan suatu hal yang dipandang tepat demi pemecahan masalah dengan menggunakan kemampuan atau daya yang dimiliki. Pada

intinya kemandirian dalam hal berpikir, bertindak dan pengendalian diri (Sulistiyani, 2004:30-34).

Hal serupa juga diungkapkan World Bank yang menyebutkan bahwa pemberdayaan sebagai upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kelompok masyarakat (miskin) untuk mampu dan berani bersuara atau menyuarkan pendapat, ide, atau gagasan-gagasannya, serta kemampuan dan keberanian untuk memilih sesuatu (konsep, metode, produk, tindakan) yang terbaik bagi pribadi, keluarga, dan masyarakatnya (Soebianto, 2013:16).

Islam memandang masyarakat sebagai sebuah sistem yang individunya saling membutuhkan dan saling mendukung. Antar individu masyarakat mempunyai hubungan yang idealnya saling menguntungkan. Kesenjangan dalam hal pendapatan ekonomi merupakan sebuah potensi yang dapat dimanfaatkan guna memupuk kerukunan dan silaturahmi antar sesama (Harahap, 2020:248-262). Sesuai dengan firman Allah SWT surat Ar-Rad ayat 11 yang berbunyi:

لَهُ مَعْقِبَتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِمَّنْ أَمَرِ اللَّهُ أَنْ لَا يُغَيِّرَ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۚ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ۚ (الرعد/13:11)

Artinya: “Baginya (manusia) ada (malaikat-malaikat) yang menyertainya secara bergiliran dari depan dan belakangnya yang menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia” (Ar-Ra'd/13:11).

Ayat di atas menegaskan bahwa Allah tidak akan meninggikan derajat dan martabat suatu masyarakat, kecuali mereka mengubah sendiri yang melakukannya. Melalui ayat tersebut, manusia diminta untuk berusaha meningkatkan kompetensi dan bekerja keras, sehingga mampu mencapai kemandirian. Berdasarkan ayat tersebut, maka dapat kita ketahui bahwasanya tujuan pemberdayaan adalah membekali masyarakat dengan kemampuan untuk mengubah nasib mereka. Adapun derajat keberdayaan yang pertama adalah kesadaran dan keinginan untuk berubah, tanpa keinginan untuk memperbaiki diri, masyarakat akan sulit untuk dapat meningkatkan taraf hidupnya (Lestari, 2021:55).

Menurut Iswari dkk dalam Jurnal Pendidikan Ekonomi (2019), dalam penelitiannya dengan judul pemberdayaan masyarakat pesisir dalam upaya meningkatkan ekonomi di Dusun Pangkung Dedari, Desa Melaya Kecamatan Melaya, bahwa program pemberdayaan yang akan dilaksanakan haruslah direncanakan dengan matang agar mendapatkan hasil yang optimal, disamping itu perlu juga arahan dan pendampingan serta sarana prasarana yang mendukung untuk pemberdayaan supaya berjalan maksimal (Iswari, 2019:509-516).

Berdasarkan fakta awal di lapangan ditemukan bahwa pemberdayaan ibu rumah tangga Desa Binanga Panasahan yang dimaksud di sini adalah ibu rumah tangga yang memiliki kesempatan untuk membuat usaha kecil-kecilan ataupun ingin melakukan sebuah pekerjaan tambahan sehari-hari untuk meningkatkan ekonomi di keluarganya, akan tetapi terkendala dengan modal sehingga membuat mereka hanya pasrah dan tidak mempunyai ide lagi untuk

meningkatkan ekonomi mereka. Sehingga dengan adanya PNPM mandiri di Desa Binanga Panasahan memberikan peluang atau kesempatan kepada masyarakat Binanga Panasahan untuk melakukan sebuah perogram yang mana perogram tersebut akan membantu ekonomi mereka, dengan cara PNPM mandiri ini memberikan bantuan kepada masyarakat Desa Binanga Panasahan Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara berupa pinjaman modal, agar masyarakat desa tersebut dapat membuka usaha-usaha yang ingin mereka lakukan seperti usaha jualan kerupuk, rumah makan kecil-kecilan dan lain- lain.

PNPM mandiri di Desa Binanga Panasahan, Kecamatan Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara, sesuai dengan fakta awal yang penulis dapati bahwa program ini dimulai pada awal Bulan Maret 2025, tepatnya pada tanggal 03 Maret 2025, berupa pinjaman modal usaha dalam bentuk uang tunai, uang tunai tersebut berjumlah Rp. 7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah) yang diberikan kepada setiap masyarakat yang memenuhi persyaratannya berupa:

1. Masyarakat yang ingin mendapatkan pinjaman harus memiliki usaha yang akan dibuka dengan begitu masyarakat akan diberikan bantuan pinjaman modal.
2. Mempunyai KTP (Kartu Tanda Penduduk)
3. Mempunyai KK (Kartu Keluarga)
4. Pinjaman tersebut hanya berlaku untuk 1 orang perKK
5. Dan harus mengikuti pelatihan yang diadakan oleh program PNPM-MPd

Program yang diadakan oleh PNPM-MPd di Desa Binanga Panasahan ini, yaitu adanya pelatihan untuk ibu-ibu rumah tangga yang akan membuka usaha

dengan dana pinjaman, dari hasil usaha inilah masyarakat yang mendapatkan pinjaman mengembalikan pinjamannya dengan cara dicicil 1 kali dalam 2 Minggu dengan jumlah cicilan Rp. 337.000 (Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah). Adapun daftar masyarakat yang mendapatkan bantuan yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1. Daftar Penerima Bantuan Program Pnpm-Mpd Tahun 2025-2026 Desa Binanga Panasahan

No	Nama Penerima	Tempat, Tanggal Lahir	Jenis Usaha	Jumlah Bantuan Modal
1	Bisro Siregar	Bunut, 12 Oktober 1981	Usaha Rumah Makan	Rp 7.000.000
2	Demita Siregar	Salang Dolok, 07 Oktober 1987	Warung Sembako	Rp 7.000.000
3	Lanna Ritonga	B. Panasahan, 05 Maret 1991	Jualan Sayur	Rp 7.000.000
4	Maida Siregar	Batu Hibul, 08 Mei 1990	Jahit / Konveksi	Rp 7.000.000
5	Mega Siregar	Nabonggal, 05 Februari 1980	Jualan Ikan	Rp 7.000.000
6	Mirna Rambe	Sigordang, 20 Oktober 1989	Jualan Baju	Rp 7.000.000
7	Putri Ayu Harahap	B. Panasahan, 01 Juli 1970	Kue Rumahan	Rp 7.000.000
8	Sucia Ningsih Nasution	B. Panasahan, 10 April 1987	Kelontong	Rp 7.000.000

Sumber: Mela Berti Siregar, Pengurus PNPM-MPd, wawancara Rabu, 17 September 2025

Dari beberapa deskripsi awal dan informasi dari responden, pada saat ini khususnya di Desa Binanga Panasahan Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara, terkendala atau hambatannya dapat dilihat dari bagaimana cara masyarakat menyikapi dan menjalankan pinjaman modal yang telah didapatkan dari program PNPM-MPd ini, yang mana dari sebagian masyarakat mendapatkan pinjaman, ada yang bersikap jujur menjalankan program tersebut sesuai dengan persyaratan yang telah disetujui, yaitu pinjaman modal didapatkan jika individu membuka usaha yang akan dimodali dari pinjaman tersebut. Namun sebagian masyarakat yang lain tidak bersikap jujur, yang katanya pinjaman modal tersebut untuk membuka usaha kenyataannya malah sebaliknya, modal tersebut tidak digunakan untuk membuka usaha. Sesuai hasil wawancara penulis dengan salah satu masyarakat yang mendapatkan pinjaman modal dari PNPM-MPd, yaitu Ayu pedagang kecil yang mendapatkan pinjaman modal dari Program ini, beliau mengatakan bahwa:

“Kalau dibilang terbantu, kami sangat terbantu dengan program yang diadakan PNPM-MPd ini apalagi saya dengan mata pencarian ya dari usaha ini, saya membuka usaha dagang ini belum lama sih, dari Bulan Mei ini abis lebaran, sampai sekarang. Tapi ya itu namanya manusia pasti ada yang berfikiran baik dan buruk kita tidak ada yang sempurna, sebagian tetangga saya ada dia minjam tapi tidak digunakan untuk membuka usaha, tidak sesuai dengan perjanjian awal yang telah disepakati ya begitulah akhirnya pinjaman tersebut diminta lagi tanpa sesuai jadwal pembayaran cicilannya. Kami bayar cicilannya 1 kali dalam 2 Minggu. Cicilannya sebesar Rp. 337.000 (Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah), dan pinjaman modalnya dikasi sebanyak Rp. 7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah) perKK. Alhamdulillah sangat bersyukur saya, sangat-sangat membantu masyarakat disini apalagi kami dibimbing juga bagaimana cara membuka usaha dengan modal yang diberikan oleh program ini, waktu itu ada pelatihannya, lumayan banyak yang mengikuti” (08 Juli 2025).

Dari pernyataan di atas, penulis melihat keadaan di lapangan tidak sesuai dengan teori. Masih banyak ketimpangan-ketimpangan terjadi yang membuat potensi yang ada tidak bisa dimanfaatkan. Potensi yang seharusnya digali dan dikembangkan ternyata tidak dilakukan.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan dan pengangguran berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pinjaman pendanaan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan (Dapartemen Pekerjaan Umum, 2007:36).

Secara regulasi nasional, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) telah berakhir pada tahun 2014. Namun, aset dana bergulirnya masih dikelola oleh masyarakat melalui Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang kini bertransformasi menjadi BUMDes Bersama/BUMDesma. Objek yang diteliti dalam skripsi ini adalah Dana Bergulir Masyarakat Eks-PNPM-MPd pada kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Desa Binanga Panasahan, Kecamatan Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara yang masih aktif berjalan pada periode 2025-2026 dengan jumlah 8 orang masyarakat penerima, masing-masing Rp.7.000.000,- dengan angsuran Rp.337.000,- per dua minggu. Istilah PNPM-MPd dalam penelitian ini merujuk pada kelembagaan tersebut.

Dari pernyataan di atas, diharapkan dengan adanya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) dapat memberikan masyarakat di Desa Binanga Panasahan Kabupaten Padang Lawas Utara solusi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat yang sulit agar lebih berkualitas lagi. Dengan adanya program yang terstruktur masyarakat mendapatkan ilmu pengetahuan, kemampuan dan keterampilan dibidang apapun. Dari penjelasan ini, sehingga penulis sangat tertarik untuk meneliti keseluruhan permasalahan ini dengan judul **“Peran PNPM-MPd dalam Pemberdayaan Ibu Rumah Tangga di Desa Binanga Panasahan Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah yang akan penulis teliti adalah bagaimana peran PNPM-MPd dalam pemberdayaan Ibu Rumah Tangga di Desa Binanga Panasahan Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara?

C. Batasan Masalah

Dari rumusan masalah yang telah penulis paparkan di atas, sehingga penelitian ini penulis batasi dengan:

1. Bagaimana peranan nyata (*Enacted Role*) PNPM-MPd dalam pemberdayaan Ibu Rumah Tangga di Desa Binanga Panasahan Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara?

2. Bagaimana peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*) PNPM-MPd dalam pemberdayaan Ibu Rumah Tangga di Desa Binanga Panasahan Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Mengetahui peranan nyata (*Enacted Role*) PNPM-MPd dalam pemberdayaan Ibu Rumah Tangga di Desa Binanga Panasahan Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara
- b) Mengetahui peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*) PNPM-MPd dalam pemberdayaan Ibu Rumah Tangga di Desa Binanga Panasahan Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara

2. Kegunaan Penelitian

- a) Untuk pegangan informasi dan sumbangan penelitian bagi pihak yang membutuhkan terhadap PNPM-MPd di Desa Binanga Panasahan Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara
- b) Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis terhadap peningkatan ekonomi masyarakat melalui PNPM-MPd di Desa Binanga Panasahan Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara
- c) Untuk beberapa syarat dalam mendapatkan gelar (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Prodi Pengembangan Masyarakat Islam UIN Imam Bonjol Padang.

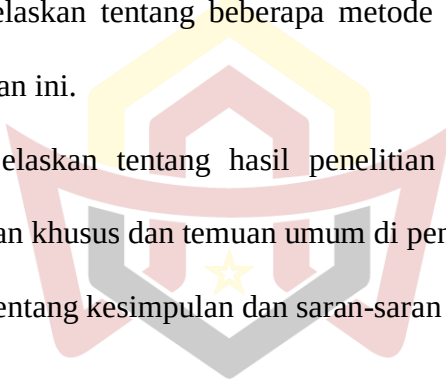
E. Penjelasan Judul

1. Peran adalah perangkat tingkah laku, hak, dan kewajiban yang diharapkan dari seseorang berdasarkan status atau kedudukan sosialnya dalam masyarakat (KBBI edisi ke-4, 2014:7).
2. PNPM-MPd adalah singkatan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan ini merupakan program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan dan pengangguran berbasis pemberdayaan masyarakat (Dapartemen Pekerjaan Umum, 2007:36).
3. Pemberdayaan adalah proses untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan individu atau masyarakat agar mandiri dan mampu mengendalikan hidupnya sendiri, seringkali dengan fokus pada pengembangan pengetahuan, sikap, keterampilan, dan memanfaatkan sumber daya yang ada (Soebianto, 2013:16).
4. Ibu Rumah Tangga adalah seorang wanita, biasanya yang sudah menikah, yang mengurus dan mengelola rumah tangga keluarganya sebagai peran utamanya, seperti mengasuh anak, memasak, membersihkan, memelihara rumah, dan mengatur kebutuhan keluarga lainnya, tanpa bekerja di luar rumah untuk mendapatkan penghasilan (Wikipedia Contributor, 2013).
5. Desa Binanga Panasahan merupakan sebuah desa yang berada di Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara.

F. Sistematika Penulisan

Di bagian ini akan digambarkan gambaran yang menyinggung kerangka sistematik penulisan, atau garis-garis besar penelitian ini. Yaitu sebagai berikut:

1. Bab I berisi tentang Pendahuluan, yang didalamnya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan judul penelitian, dan sistematika penulisan.
2. Bab II membahas tentang kerangka teori yang meliputi beberapa kajian tentang PNPM-MPd, peran perempuan, pemberdayaan, dan kesejahteraan.
3. Bab III menjelaskan tentang beberapa metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini.
4. Bab IV menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi temuan khusus dan temuan umum di penelitian ini
5. Bab V berisi tentang kesimpulan dan saran-saran



UIN IMAM BONJOL
PADANG



UIN IMAM BONJOL
PADANG